

ANALISIS KETIDAKBERLANJUTAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA MANGROVE BELAWAN SICANANG: PERPEKTIF TATA KELOLA DAN LINGKUNGAN

Rahma Yani Hasibuan¹, Rini Armianti Berutu², Asha Yatri Saragih³, Fretty Luciana Gurning⁴, Dewi Sartika Siregar⁵, Julia Ivanna⁶, Irhas Jaya⁷

rahma.3212411020@mhs.unimed.ac.id¹, armiantirini28@gmail.com²,
 ahasaragih123@gmail.com³, frettyluciana@gmail.com⁴, sartikadew875@gmail.com⁵,
 juliaivanna@unimed.ac.id⁶, irhasjaya96@gmail.com⁷

Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Published Desember 31, 2024

Kata Kunci:

Ketidakterlanjutan, Ekowisata, Mangrove Belawan Sicanang.

Keywords: Unsustainability, Ecotourism, Belawan Sicanang Mangrove.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan ekowisata Mangrove Belawan Sicanang, dengan perspektif tata kelola dan lingkungan. Kawasan ekowisata ini memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata alam sekaligus penting bagi pelestarian ekosistem mangrove. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi masyarakat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang permasalahan yang ada melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberlanjutan pengelolaan ekowisata ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya partisipasi masyarakat lokal, serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam tata kelola yang lebih inklusif dan ramah lingkungan untuk mencapai keberlanjutan ekowisata Mangrove Belawan Sicanang.

ABSTRACT

This research aims to analyze the unsustainability of management of the Belawan Sicanang Mangrove ecotourism area, from a governance and environmental perspective. This ecotourism area has great potential as a natural tourist attraction and is also important for preserving the mangrove ecosystem. However, its management faces various challenges that threaten the sustainability of the ecosystem and the socio-economic benefits of society. Qualitative research methods are used to gain an in-depth understanding of existing problems through interviews, observations and documentation studies. The research results show that the unsustainability of ecotourism management is caused by factors such as lack of coordination between stakeholders, minimal participation of local communities, and environmental damage due to activities that are not environmentally friendly. Therefore, improvements are needed in governance that is more inclusive and

1. PENDAHULUAN

Penataan daerah yang baik sangat berpengaruh dan penting untuk melindungi ekosistem mangrove, yang berfungsi sebagai pelindung dari abrasi dan banjir. Di Sicanang, upaya penataan ruang seharusnya mencakup penetapan kawasan perlindungan mangrove seluas 178 hektar, yang dirancang untuk menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung konservasi Ekowisata mangrove di Sicanang pernah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat lokal. Melalui pengelolaan yang tepat, ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Penataan daerah yang mendukung aksesibilitas dan amenities bagi wisatawan adalah kunci penting untuk menarik pengunjung dan memaksimalkan manfaat ekonomi dari ekowisata ini.

Salah satu fungsi dari kawasan mangrove adalah sebagai tempat ekowisata. Australian Department of Tourism (Black, 1999) menyatakan bahwasanya ekowisata adalah wisata yang berkonsentrasi pada alam dengan mengaitkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Salah satu ekowisata mangrove yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah Ekowisata Mangrove Sicanang yang berada di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Ekowisata Mangrove Sicanang merupakan satu-satunya ekosistem mangrove yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Ekowisata mangrove merupakan suatu bentuk perjalanan wisata ke kawasan mangrove yang dilestarikan dan wisatawan tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga untuk pendidikan, pelestarian alam dan pelestarian kehidupan. Luas wilayah Kecamatan Belawan Sicanang mempunyai luas 1.550 Ha, dengan kawasan hutan mangrove seluas 450 ha dengan potensi yang baik untuk dijadikan kawasan ekowisata. (Editya, 2020). Meskipun masih dikelola oleh kelompok pecinta mangrove (swasta) dan tidak didukung biaya oleh pihak lain, tetapi ekosistem ini mampu bertahan hingga saat ini. Permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi pada Ekowisata Mangrove Sicanang adalah maraknya pencurian tanaman mangrove oleh oknum tidak bertanggung jawab dan adanya mafia yang ingin mengambil alih ekosistem tersebut untuk kepentingan pribadi. Padahal, potensi hutan mangrove ini dapat dioptimalkan dan dapat menjadi tonggak perputaran ekonomi bagi masyarakat sekitar dan retribusi bagi pemerintah kota. Untuk itu, peranan pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan Hutan Mangrove Sicanang.

Sejak tahun 2013 upaya pengembangan ekowisata mangrove telah dimulai di Belawan Sicanang. Melalui keterlibatan stakeholder seperti Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU), pemerintah, dan perusahaan swasta, konsep ekowisata telah dirancang secara bertahap. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga dan mengelola lahan mangrove, dengan pendekatan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Ini mencakup edukasi tentang jenis-jenis mangrove, yang dilakukan baik untuk anak-anak sekolah maupun masyarakat umum. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan dalam pengembangan ekowisata mangrove di Belawan Sicanang, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dapat menjadi kunci keberhasilan dalam pelestarian lingkungan sambil meningkatkan potensi ekonomi lokal (Dian et al., 2024). Keterlibatan

masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove sangat penting. Di Sicanang, masyarakat bersama organisasi seperti Yayasan Gajah Sumatera (Yagasu) berperan aktif dalam menanam mangrove dan mengedukasi pengunjung mengenai pentingnya konservasi. Penataan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekowisata dapat dirasakan secara merata oleh komunitas lokal. Pengembangan ekowisata di Sicanang telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan peluang usaha. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dampak negatif seperti kerusakan lingkungan juga bisa terjadi. Oleh karena itu, penataan daerah harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan agar manfaat jangka panjang dapat tercapai.

Pada proses pembangunan dan pengembangan pariwisata, pasti akan selalu disertai dengan munculnya dampak, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Sama halnya dengan pembangunan dan pengembangan ekowisata, kegiatan kepariwisataan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, terlebih lagi jika itu berada di kawasan penduduk. Keberadaan Ekowisata Mangrove Sicanang dalam aspek peluang usaha yang dijalankan oleh beberapa masyarakat baik di dalam lingkungan Ekowisata Mangrove Sicanang dan di sekitarnya, di mana diketahui bahwa Ekowisata tersebut sangat dekat dengan perumahan warga sehingga untuk berjualan di rumah-rumah warga bisa dilakukan. Akan tetapi kondisi realitas fisik yang terlihat pada realitas kehidupan di Kelurahan Belawan Sicanang terutama pada Ekowisata Mangrove Sicanang adalah bahwa pengelolaan kawasan hutan mangrove masih sering melupakan aspek-aspek lingkungan, dimana masih ditemukannya sampah-sampah yang berserakan di beberapa tempat oleh pengunjung. Kondisi seperti ini sangat memperhatikan sebab hal ini bertentangan dengan ekowisata tersebut yang menginginkan wisata alam dengan tujuan pendidikan dan konservasi alam.

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan mangrove harus sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove di kota Medan yang sesuai dengan tujuan penataan daerah. Selain itu, ekowisata mangrove tersebut dibuat untuk edukasi dan pendidikan, juga sumber ekonomi bagi masyarakat. Ekowisata ini dikelola dan diawasi oleh kelompok masyarakat setempat yaitu, Kelompok pengelola daerah perlindungan mangrove sebagai organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan surat Keputusan Kepala Kelurahan Belawan Sicanang.

Namun, pada masa sekarang ini ekowisata mangrove di Belawan Sicanang sudah tidak aktif lagi dan dikatakan sudah punah. Dengan melihat kondisi ekosistem mangrove Sicanang yang telah mengalami penurunan, bahkan sudah punah maka dibutuhkan Penataan daerah yang terintegrasi dengan strategi konservasi akan membantu mengembalikan fungsi ekologis mangrove sekaligus mendukung pengembangan ekowisata. Secara keseluruhan, penataan daerah yang efektif dan berkelanjutan sangat penting dalam mendukung pengembangan ekowisata mangrove di Sicanang, meskipun saat ini kawasan tersebut mengalami tantangan serius akibat punahnya ekosistemnya. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta diperlukan untuk mengembalikan potensi kawasan ini sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan.

Ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan ekowisata mangrove di Belawan Sicanang dapat dipahami melalui berbagai perspektif tata kelola dan di lingkungan. Faktor yang dimaksud bisa saja dari kurangnya pemahaman dan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove. Karena banyak warga yang masih melakukan penebangan pohon mangrove untuk kebutuhan ekonominya, sampah juga terlihat berserak di mana-

mana dan edukasi yang tidak memadai mengenai manfaat mangrove dan cara pengelolaannya merupakan penghalang dalam upaya konservasi. Selanjutnya minimnya dukungan dan perhatian dari pemerintah, hal ini diketahui bahwasanya meskipun ada inisiatif dari pemerintah untuk mengembangkan ekowisata mangrove ini tetapi perhatian dan dukungan yang diberikan tidak cukup. Penelitian menunjukkan bahwa sejak penutupan ekowisata pada tahun 2020, tidak ada perawatan yang memadai dari pemerintah yang menyebabkan fasilitas menjadi terbengkalai dan tidak terawat. Tanpa adanya dukungan kebijakan yang kuat dan tindakan nyata dari pemerintah maka upaya konservasi menjadi sulit untuk dilaksanakan. Selain itu infrastruktur yang buruk juga menjadi pengaruh terhadap ketidakberlanjutan kawasan ekowisata mangrove ini, di mana akses jalan yang rusak dan fasilitas yang tidak terawat mengurangi daya tarik bagi pengunjung atau wisatawan yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan dan pastinya mengurangi pendapatan komunitas lokal dari kegiatan ekowisata tersebut. Secara keseluruhan, ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan ekowisata mangrove di Belawan cicanang disebabkan oleh kombinasi faktor sosial ekonomi dan kelembagaan. Untuk mencapai keberlanjutan diperlukan adanya pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, dukungan pemerintah yang kuat, kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

2. METODOLOGI

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Secara dasar, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti situasi dan kondisi yang terjadi, hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, serta akibat atau efek yang terjadi (Rusli, n.d.). Penelitian kualitatif deskriptif ini tepat digunakan dalam konteks penelitian ini karena peneliti akan mengulas mengenai analisis ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan ekowisata mangrove belawan sicanang: perspektif tata kelola dan lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat Belawan Sicanang. Sementara itu, data sekunder meliputi informasi yang diambil dari sumber-sumber tertulis seperti jurnal, buku, serta dokumen resmi untuk mendukung hasil penelitian. Penelitian dilakukan di kawasan Ekowisata Mangrove Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Pada penelitian deskriptif kualitatif ini, metode analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menginvestigasi fenomena alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam prosesnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yang lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang sudah ada sebelumnya, kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Tata Ruang dengan Fungsi Ekologis Kawasan Mangrove

Kawasan mangrove di Belawan Sicanang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, termasuk sebagai habitat keanekaragaman hayati, pengendali abrasi pantai, dan

penyerapan karbon. Namun, keberlanjutan fungsi-fungsi ini sangat bergantung pada kesesuaian tata ruang kawasan dengan peruntukannya. Dalam konteks rencana tata ruang wilayah (RTRW), mangrove umumnya termasuk dalam zona konservasi atau kawasan lindung yang memiliki pembatasan tertentu terhadap kegiatan manusia (Asriani et al., 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara fungsi ekologis kawasan mangrove dan implementasi tata ruang.

Salah satu permasalahan utama adalah konversi lahan mangrove menjadi pemukiman, tambak, dan area wisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan. Kajian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar area mangrove di Belawan Sicanang telah terdegradasi akibat aktivitas manusia yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruangnya (Asriani et al., 2021). Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW dan adanya konflik kepentingan antara pemanfaatan lahan untuk ekonomi dan konservasi. Misalnya, pembukaan tambak sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar zonasi yang telah ditetapkan, yang menyebabkan berkurangnya tutupan mangrove secara signifikan.

Lebih jauh, zonasi yang ditetapkan dalam RTRW sering kali tidak mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal di sekitar kawasan mangrove cenderung mengandalkan sumber daya mangrove untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kayu bakar dan hasil perikanan (Kartika et al., 2023). Ketidakselarasan antara kebijakan tata ruang dan kebutuhan masyarakat ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga meningkatkan konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Dalam teori penataan ruang, keberlanjutan kawasan mangrove seharusnya dicapai melalui pendekatan zonasi yang mempertimbangkan fungsi ekologis dan kebutuhan ekonomi secara seimbang (Kartika et al., 2023). Namun, di Belawan Sicanang, pendekatan ini masih kurang optimal karena minimnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan tata ruang. Hal ini diperburuk oleh tekanan dari sektor ekonomi, seperti ekspansi infrastruktur dan pariwisata yang sering kali mengabaikan dampak lingkungan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah benar-benar diimplementasikan sesuai peruntukannya dan bahwa mekanisme pengawasan diperkuat. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penataan ruang, sehingga pengelolaan kawasan mangrove dapat berjalan lebih berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa keberlanjutan kawasan mangrove di Belawan Sicanang tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada sinergi antara kebijakan tersebut dan implementasi di lapangan.

2. Perspektif Penataan Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata

Penataan daerah memainkan peran penting dalam pengelolaan kawasan ekowisata, termasuk mangrove Belawan Sicanang, dengan memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dalam teori penataan daerah, integrasi lintas sektor dan pendekatan berbasis ekosistem merupakan prinsip utama yang harus diterapkan untuk mengelola kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti mangrove (Kariaman, 2024). Namun, implementasi prinsip ini di Belawan Sicanang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik kepentingan antar-pemangku kepentingan hingga kurangnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

Dari perspektif tata kelola, pengelolaan kawasan mangrove di Belawan Sicanang belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan penataan daerah yang holistik. Rencana pengelolaan masih terfragmentasi antara otoritas lokal, provinsi, dan sektor swasta,

sehingga menciptakan tumpang tindih kebijakan dan pelaksanaan di lapangan (Alfarisi, 2023). Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur pariwisata sering kali tidak terkoordinasi dengan kebijakan konservasi, sehingga menyebabkan degradasi ekosistem mangrove.

Selain itu, teori penataan daerah menekankan pentingnya pendekatan berbasis partisipasi, di mana masyarakat lokal diberi peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan (Kartika et al., 2023). Namun, di Belawan Sicanang, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan mangrove masih minim. Banyak dari mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, meskipun mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tata ruang yang diterapkan (Asriani et al., 2021). Hal ini tidak hanya mengurangi efektivitas pengelolaan kawasan, tetapi juga meningkatkan potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Di samping itu, kurangnya data yang komprehensif mengenai kondisi ekosistem mangrove dan potensi ekowisata juga menjadi hambatan dalam pengelolaan berbasis penataan daerah. Padahal, teori penataan daerah menekankan pentingnya pengelolaan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat (Kariaman, 2024). Tanpa data yang akurat, perencanaan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan ekosistem maupun masyarakat lokal, sehingga tujuan keberlanjutan sulit dicapai. Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat pendekatan penataan daerah di Belawan Sicanang. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan koordinasi antar-pemangku kepentingan, pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan tata ruang, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, kawasan ekowisata mangrove dapat dikelola secara lebih berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat sekitar.

Penataan daerah yang ideal juga seharusnya mengintegrasikan prinsip ekoregion, yaitu pendekatan yang melihat suatu kawasan sebagai satu kesatuan ekologis tanpa terikat batas administratif. Dalam konteks Belawan Sicanang, mangrove yang berada di wilayah ini merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang lebih luas di Sumatera Utara. Ketidakterpaduan kebijakan antar daerah sering kali menyebabkan pengelolaan yang parsial dan tidak efektif. Sebagai contoh, limbah industri dari kawasan lain yang tidak terkontrol sering mencemari kawasan mangrove Belawan Sicanang, sehingga mengurangi daya dukung lingkungan untuk mendukung ekowisata dan keberlanjutan ekosistem (Wahyuni Harahap et al., 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antar wilayah dalam kebijakan penataan ruang.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan kawasan ekowisata mangrove juga bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan insentif bagi sektor swasta agar terlibat dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Di banyak kasus, pengelolaan kawasan ekowisata cenderung didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Teori penataan daerah menyarankan perlunya penerapan skema insentif, seperti pajak lingkungan atau sertifikasi ekowisata, yang dapat mendorong sektor swasta untuk berkontribusi dalam pelestarian ekosistem (Kariaman, 2024). Dengan insentif yang tepat, pengelolaan kawasan mangrove di Belawan Sicanang dapat dilakukan secara lebih kolaboratif dan bertanggung jawab, sehingga mampu mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Dampak Ketidakberlanjutan terhadap Lingkungan Mangrove

Ketidakterlanjutan dalam pengelolaan kawasan mangrove Belawan Sicanang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Salah satu dampak yang paling

terlihat adalah degradasi ekosistem mangrove, yang terjadi akibat konversi lahan untuk tambak, permukiman, dan kegiatan wisata yang tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa area mangrove di kawasan ini semakin menyempit dari waktu ke waktu akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali (Asriani et al., 2021). Penurunan luas mangrove ini menyebabkan berkurangnya fungsi ekologisnya sebagai pelindung pesisir dari abrasi, penyerap karbon, dan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna.

Dampak lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan mangrove. Berkurangnya luas hutan mangrove telah memengaruhi populasi satwa lokal, termasuk burung, ikan, dan spesies endemik lainnya. Kajian dari Wibisono dan Suryadiputra (2006) menyebutkan bahwa ekosistem mangrove yang terfragmentasi tidak mampu mendukung keanekaragaman hayati secara optimal karena terganggunya siklus ekologis seperti penyerbukan dan pemijahan ikan. Kondisi ini juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir, seperti nelayan yang melaporkan semakin sulitnya mendapatkan hasil tangkapan ikan akibat rusaknya habitat mangrove.

Selain itu, kerusakan mangrove di Belawan Sicanang telah meningkatkan kerentanan kawasan terhadap bencana alam, seperti banjir rob dan abrasi pantai. Dengan semakin berkurangnya mangrove, daerah ini kehilangan tameng alami yang melindungi pesisir dari gelombang tinggi dan intrusi air laut (Wahyuni Harahap et al., 2023). Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove sering menghadapi kerugian material dan non-material akibat bencana yang semakin sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa degradasi mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

Dampak negatif ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kelestarian mangrove. Banyak masyarakat yang masih memanfaatkan kawasan mangrove secara eksploitatif, seperti menebang kayu untuk keperluan pribadi atau membuka tambak tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Pada saat yang sama, sektor wisata yang berkembang di kawasan ini sering kali tidak mematuhi prinsip ekowisata, seperti pembangunan fasilitas yang merusak ekosistem mangrove (Asriani et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi dampak lingkungan masih sangat minim, baik dari sisi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Selanjutnya langkah mitigasi harus difokuskan pada rehabilitasi ekosistem mangrove, penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi, dan edukasi kepada masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan mangrove, di mana masyarakat diberdayakan untuk menjaga ekosistem sambil tetap mendapatkan manfaat ekonomi. Hanya dengan cara ini, fungsi ekologis mangrove Belawan Sicanang dapat dipulihkan dan dipertahankan untuk generasi mendatang.

Selain dampak langsung terhadap lingkungan, ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan mangrove di Belawan Sicanang juga memengaruhi siklus hidrologi di daerah tersebut. Hilangnya mangrove sebagai penyerap air dan penahan banjir telah memperparah masalah genangan air di wilayah pesisir, terutama saat musim hujan atau pasang laut. Mangrove memiliki peran penting sebagai buffer alami yang mampu menyerap kelebihan air dan memitigasi dampak limpasan permukaan. Ketika area mangrove berkurang, limpasan air hujan yang tidak terserap langsung mengalir ke permukiman dan menyebabkan banjir lebih sering terjadi. Selain itu, intrusi air laut semakin meluas ke daratan, yang merusak kualitas tanah dan sumber air tawar masyarakat lokal. Situasi ini menambah beban sosial dan ekonomi masyarakat, karena mereka harus mengalokasikan lebih banyak sumber

daya untuk menangani dampak lingkungan tersebut (Wahyuni Harahap et al., 2023).

Ketidakberlanjutan pengelolaan juga mengancam potensi kawasan sebagai ekowisata yang ramah lingkungan. Mangrove yang terdegradasi tidak lagi menarik bagi wisatawan karena hilangnya keindahan alami dan keanekaragaman hayati. Penurunan kualitas lingkungan ini berpotensi menurunkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan mengurangi minat investor untuk mendukung pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Padahal, jika dikelola dengan baik, mangrove dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama untuk kegiatan seperti pengamatan burung, eksplorasi ekosistem, atau pendidikan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk segera mengadopsi strategi pengelolaan yang berorientasi pada keberlanjutan agar kawasan mangrove Belawan Sicanang dapat berfungsi kembali sebagai destinasi ekowisata yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Asriani et al., 2021).

4. Upaya Pemulihan dan Strategi Pengelolaan Berkelanjutan

Pemulihan kawasan mangrove di Belawan Sicanang membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui program rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan menanam kembali mangrove di area yang telah terdegradasi, menggunakan spesies asli yang sesuai dengan kondisi ekosistem setempat. Namun, upaya ini perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat agar mereka memahami pentingnya menjaga keberlanjutan mangrove. Penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat cenderung lebih berhasil dibandingkan yang dilakukan secara top-down (Asriani et al., 2021).

Selain rehabilitasi, strategi pengelolaan kawasan mangrove juga harus mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pelanggaran terhadap zonasi kawasan mangrove, seperti konversi lahan tanpa izin, perlu ditangani secara tegas melalui koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa kebijakan tata ruang, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), diselaraskan dengan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan berbasis ekosistem. Hal ini mencakup penetapan kawasan konservasi yang jelas dan pembatasan aktivitas yang dapat merusak lingkungan, seperti pembukaan tambak atau pembangunan infrastruktur tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai (Kariaman, 2024).

Sangat penting untuk mengintegrasikan teknologi dalam upaya pengelolaan mangrove. Penggunaan teknologi seperti pemetaan drone dan citra satelit dapat membantu memantau kondisi kawasan mangrove secara real-time dan mendeteksi perubahan lingkungan secara dini. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area prioritas rehabilitasi dan mengukur efektivitas program pemulihan. Di sisi lain, digitalisasi informasi dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap data ekosistem mangrove, sehingga mereka dapat lebih teredukasi dan terlibat dalam upaya pelestarian (Wahyuni Harahap et al., 2023). Strategi pengelolaan berkelanjutan harus mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan ekowisata. Dalam hal ini, masyarakat lokal tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana rehabilitasi, tetapi juga sebagai pengelola langsung ekowisata mangrove. Model ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan mangrove, seperti melalui penyewaan perahu wisata, jasa pemandu, atau penjualan produk lokal. Pendekatan berbasis komunitas ini telah terbukti berhasil di beberapa lokasi lain di Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan pelestarian ekosistem (Kartika et al., 2023). Keberhasilan strategi ini bergantung

pada kemitraan yang kuat antara berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat. Program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan perlu dilaksanakannya secara konsisten agar masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pengelolaan kawasan. Hanya dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, kawasan mangrove Belawan Sicanang dapat pulih dari kerusakan dan berfungsi kembali sebagai ekosistem yang mendukung keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

5. Dampak Penataan Daerah Terhadap Ketidakberlanjutan Lingkungan

Degradasi ekosistem mangrove di kawasan Belawan Sicanang akibat pengelolaan yang tidak berkelanjutan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Berbagai aktivitas seperti konversi lahan untuk tambak, pemukiman, dan wisata yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan menjadi penyebab utama kerusakan ini. Dampaknya tidak hanya terbatas pada lingkungan, seperti hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya resiko bencana, tetapi juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir serta potensi pengembangan ekowisata. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah tabel yang merangkum dampak-dampak tersebut berdasarkan berbagai penelitian:

Tabel 1. Dampak Penataan Daerah Terhadap Ketidakberlanjutan Lingkungan

No	Aspek	Dampak	Sumber Data
1	Degradasi ekosistem	Penurunan luas mangrove akibat konversi untuk tambak, pemukiman dan wisata	Asriani et al (2021).
2	Hilangnya Keanekaragaman Hayati	Penurunan populasi satwa lokal seperti burung, ikan dan spesies endemik	Asriani et al (2021).
3	Kerentanan Terhadap Bencana	Peningkatan resiko banjir rob dan abrasi pantai akibat hilangnya tameng alami	Asriani et al (2021).
4	Dampak Sosial Ekonomi	Kesulitan nelayan memperoleh hasil tangkapan ikan karena rusaknya habitat mangrove	Asriani et al (2021).
5	Kesadaran dan regulasi	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kawasan mangrove dan minimnya regulasi dan penegakan hukum terkait zonasi mangrove.	Asriani et al (2021).
	Ekowisata	Menurunnya daya tarik wisata akibat degradasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dan potensi menurunnya pendapatan daerah dan minat investor dalam pengembangan ekowisata.	Asriani et al (2021).

Kebijakan dan penataan daerah terkait dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang efektifitas pemerintahan daerah. Kebijakan Penataan Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Penataan daerah terdiri atas:

- a. pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.
- b. Pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah mencakup pembentukan daerah provinsi dan pembentukan daerah kab/kota.
- c. Pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kab/kota selama 3 tahun.

- d. Pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.
- e. serta persyaratan administrasi Pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional
- f. Pemekaran daerah baru harus mengacu desain besar strategi penataan daerah. Desain besar penataan daerah disusun oleh pemerintah dan ditetapkan dgn peraturan pemerintah.

Hutan mangrove di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Belawan, Kota Medan, merupakan salah satu ekosistem penting yang berfungsi sebagai pelindung garis pantai, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Namun, kondisi kawasan ini kini sangat memprihatinkan akibat penataan daerah yang kurang optimal. Kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Medan dan pemerintah setempat menjadi salah satu penyebab utama degradasi kawasan ini, yang menunjukkan ketidakberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan hutan mangrove.

Salah satu faktor yang memperburuk keadaan adalah tidak adanya pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan. Kawasan wisata hutan mangrove yang seharusnya menjadi salah satu daya tarik wisata ekologis kini terbenakalai. Tanpa perawatan yang memadai, hutan mangrove menghadapi ancaman seperti abrasi, perusakan habitat, serta alih fungsi lahan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam implementasi teori penataan daerah, khususnya terkait zonasi dan tata ruang yang seharusnya melindungi kawasan ekosistem kritis seperti mangrove. Selain itu, lemahnya peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat setempat memperparah situasi. Dalam teori penataan daerah, partisipasi masyarakat adalah elemen penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Namun, di Sicanang, masyarakat kurang dilibatkan dalam pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove. Akibatnya, kesadaran lokal terhadap pentingnya ekosistem mangrove rendah, dan kawasan ini terus mengalami degradasi tanpa ada upaya kolektif untuk memperbaiki keadaan.

Penataan lingkungan yang tidak berkelanjutan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem mangrove, tetapi juga pada masyarakat setempat. Hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai pelindung alami membuat wilayah Sicanang lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan abrasi. Selain itu, degradasi lingkungan ini juga memengaruhi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya mangrove, seperti perikanan dan ekowisata. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Medan perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menata ulang kawasan hutan mangrove di Sicanang. Hal ini meliputi penguatan regulasi tata ruang, pengawasan zonasi yang lebih ketat, serta pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Upaya rehabilitasi hutan mangrove juga harus menjadi prioritas, termasuk melalui program penanaman kembali dan pengembangan ekowisata berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, kawasan mangrove di Sicanang dapat dipulihkan fungsinya, baik sebagai ekosistem penting maupun sebagai aset ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

6. Peran Masyarakat Lokal dalam Penataan Daerah Kawasan Ekowisata

Pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pemerintah, tahun 2015 menduduki urutan keempat penyumbang devisa nasional sebesar 12 juta USD dan menciptakan lapangan kerja sebesar 9,8 juta atau sebesar 8,4% (Anonim 2017; Ratman 2016). Di tingkat mikro masih diragukan adanya korelasi antara besaran perolehan devisa tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi tersebut disebabkan oleh struktur industri pariwisata yang bersandar pada mekanisme pasar dalam pengadaan modal infrastruktur yang membatasi partisipasi masyarakat lokal untuk memanfaatkan keuntungan pariwisata (Damanik, 2013). Partisipasi merupakan hal penting masyarakat agar dapat

memperoleh manfaat dalam pengembangan ekowisata.

Pendekatan partisipatif memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan menciptakan peluang yang lebih baik bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dan lebih seimbang dari pengembangan pariwisata. Kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata yang dilakukan selama ini lebih banyak mengungkap keterlibatan masyarakat dari golongan yang memiliki modal, akses keuangan dan keterampilan, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan masyarakat swasta pelaku industri wisata (Kaharuddin, 2020).

Peran masyarakat lokal dalam penataan daerah kawasan ekowisata, seperti pengelolaan mangrove, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan lingkungan. Berdasarkan teori partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan tata ruang dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap pengelolaan kawasan tersebut. Dalam konteks mangrove, masyarakat lokal dapat berkontribusi melalui kegiatan konservasi, seperti rehabilitasi lahan mangrove yang rusak, pengembangan ekowisata berbasis komunitas, dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran zonasi atau eksploitasi berlebihan. Namun, keterlibatan masyarakat sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses informasi dan pendidikan terkait pentingnya pelestarian mangrove. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka. Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan, pendanaan, maupun kebijakan yang inklusif, juga menghambat partisipasi mereka. Faktor lain adalah konflik kepentingan, seperti tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan mangrove menjadi tambak atau permukiman.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses penataan daerah. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan edukasi yang memadai, menyediakan insentif ekonomi bagi masyarakat yang aktif dalam pelestarian, serta membangun mekanisme kolaborasi yang mempertemukan masyarakat dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, kawasan ekowisata mangrove dapat dikelola secara lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan wisata hutan mangrove di Sicanang, Belawan, memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi daerah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kawasan tersebut dengan membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti penjualan makanan, minuman, kerajinan tangan, serta jasa pemandu wisata. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga menciptakan dampak ekonomi berganda bagi wilayah sekitar. Namun, di tengah peran positif tersebut, muncul kendala berupa tindakan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga tiket masuk secara tidak wajar. Hal ini dapat menyulitkan pengunjung dan berpotensi menurunkan minat wisatawan untuk datang.

7. Ketidakseimbangan Antara Penataan Ruang dan Keberlanjutan Ekowisata

Ketidakseimbangan antara penataan ruang dan keberlanjutan ekowisata sering kali muncul akibat prioritas yang lebih besar diberikan pada eksploitasi kawasan untuk tujuan ekonomi dibandingkan dengan upaya konservasi. Dalam banyak kasus, tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah atau memacu pertumbuhan ekonomi lokal mendorong pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sering terjadi di kawasan ekowisata, termasuk hutan mangrove, di mana potensi ekonomi jangka pendek

seperti pengembangan tambak, infrastruktur wisata berlebihan, atau aktivitas komersial lainnya mengabaikan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.

Di satu sisi, kawasan ekowisata seperti hutan mangrove memiliki nilai ekonomi yang signifikan sebagai destinasi wisata alam dan sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal. Namun, ketika pengelolaan kawasan tersebut tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan, ekosistem yang menjadi daya tarik utama justru mengalami kerusakan. Misalnya, pembangunan fasilitas wisata yang tidak terkontrol dapat menyebabkan hilangnya vegetasi mangrove, menurunkan kualitas lingkungan, dan mengganggu habitat fauna. Akibatnya, daya dukung lingkungan kawasan tersebut berkurang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelangsungan ekowisata itu sendiri.

Ketidakseimbangan ini juga diperparah oleh kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Dalam banyak kasus, keputusan penataan ruang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal atau ahli lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali bias terhadap kepentingan ekonomi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang, seperti alih fungsi lahan konservasi menjadi komersial, memperburuk situasi. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan pendekatan tata ruang yang integratif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penataan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan harus diterapkan secara tegas, termasuk pengaturan zonasi yang jelas, pengawasan ketat terhadap aktivitas yang melanggar, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Upaya konservasi, seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan limbah, harus menjadi prioritas dalam pengembangan ekowisata. Dengan demikian, keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat dicapai, menjadikan ekowisata sebagai model pembangunan yang berkelanjutan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat serta ekosistem.

8. Strategi Penguatan Penataan Daerah untuk Pengelolaan Berkelanjutan

Penguatan penataan daerah untuk pengelolaan berkelanjutan sangat relevan diterapkan di kawasan wisata hutan mangrove di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang tidak hanya mendukung perekonomian masyarakat lokal tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal jika pengelolaannya dilakukan secara strategis dengan pendekatan yang terintegrasi.

1. Pendekatan Ekoregion di Kawasan Mangrove Sicanang

Pendekatan ekoregion dapat menjadi solusi utama untuk mengelola kawasan mangrove di Sicanang dengan mempertimbangkan karakteristik ekologis uniknya. Misalnya, zonasi yang jelas dapat diterapkan dengan menetapkan area konservasi mangrove untuk menjaga habitat flora dan fauna, area pemanfaatan terbatas untuk aktivitas masyarakat seperti budidaya, serta area wisata untuk kegiatan rekreasi ramah lingkungan. Zonasi ini akan mencegah konflik penggunaan lahan, seperti alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak atau permukiman, yang dapat merusak ekosistem. Selain itu, pendekatan ekoregion dapat memastikan bahwa pengelolaan kawasan tidak hanya terfokus pada batas administratif, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem mangrove secara menyeluruh.

2. Peningkatan Sinergi Lintas Sektor di Sicanang

Peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam konteks kawasan Sicanang, mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan sektor wisata. Pemerintah Kota Medan dapat memfasilitasi forum multipihak untuk membahas pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan. Melalui forum ini, pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan untuk

mengembangkan usaha berbasis ekowisata, seperti kerajinan tangan dan kuliner khas, sementara sektor akademisi dapat berkontribusi melalui penelitian tentang pemulihan ekosistem mangrove. Sinergi lintas sektor ini akan memastikan bahwa pengelolaan kawasan mangrove tidak berjalan secara parsial tetapi terintegrasi dengan kebutuhan ekologis dan ekonomi.

3. Kebijakan Adaptif Berbasis Data Lokal di Sicanang

Kebijakan yang diambil untuk kawasan mangrove di Sicanang harus berdasarkan data lokal yang akurat dan partisipasi masyarakat. Sebagai contoh, survei kondisi ekosistem mangrove dapat digunakan untuk menentukan prioritas rehabilitasi, sementara data sosial-ekonomi masyarakat dapat membantu menyusun program pemberdayaan berbasis kebutuhan lokal. Kebijakan adaptif juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan perubahan kondisi, seperti menetapkan moratorium pembangunan di area tertentu jika terjadi degradasi lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan data dan implementasi kebijakan ini akan memperkuat rasa tanggung jawab mereka terhadap kawasan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kawasan wisata hutan mangrove di Sicanang dapat dikelola secara lebih berkelanjutan. Tidak hanya ekosistemnya yang terjaga, tetapi juga manfaat ekonomi dan sosialnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Integrasi pendekatan ekoregion, sinergi lintas sektor, dan kebijakan berbasis data lokal akan menjadikan Sicanang sebagai model pengelolaan ekowisata yang berhasil.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakberlanjutan pengelolaan wisata hutan mangrove di Sicanang, Belawan, pemerintah Kota Medan dan pemerintah terkait dapat menerapkan strategi pengelolaan lanjutan yang komprehensif. Strategi ini melibatkan aspek konservasi, ekonomi, partisipasi masyarakat, serta penguatan regulasi dan kebijakan berbasis keberlanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Pemerintah perlu memprioritaskan rehabilitasi kawasan mangrove yang mengalami kerusakan. Langkah ini dapat mencakup program penanaman kembali mangrove yang melibatkan masyarakat dan organisasi lingkungan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa aktivitas di sekitar kawasan mangrove, seperti pembangunan infrastruktur atau budidaya, tidak mengganggu regenerasi ekosistem.

2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah Kota Medan harus memperketat regulasi terkait zonasi dan tata ruang di kawasan mangrove Sicanang. Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai, harus ditingkatkan. Selain itu, sanksi tegas terhadap pelanggaran perlu diterapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

3. Pengembangan Infrastruktur Wisata Berkelanjutan

Fasilitas wisata harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip ekowisata, seperti menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan memastikan tidak ada aktivitas yang merusak ekosistem mangrove. Infrastruktur dasar seperti akses jalan, dermaga kecil, dan pusat informasi harus dibangun dengan memperhatikan kapasitas lingkungan.

4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan kawasan mangrove. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan keterampilan, seperti pengelolaan wisata ramah lingkungan, pemanduan wisata, atau pengolahan hasil mangrove menjadi produk bernilai tambah. Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis ekowisata harus difasilitasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

5. Sinergi Lintas Sektor dan Kolaborasi Multipihak

Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan akademisi untuk mengembangkan solusi inovatif bagi pengelolaan kawasan. Misalnya, sektor swasta dapat dilibatkan dalam pengembangan fasilitas wisata yang ramah lingkungan, sementara akademisi dapat berkontribusi dengan riset untuk mendukung pelestarian ekosistem.

6. Edukasi dan Kampanye Kesadaran Lingkungan

Kesadaran masyarakat umum dan pengunjung tentang pentingnya pelestarian mangrove harus ditingkatkan. Pemerintah dapat mengadakan kampanye lingkungan, program pendidikan di sekolah, dan promosi ekowisata untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai ekologis dan ekonomis kawasan mangrove.

7. Kebijakan Adaptif Berbasis Data Lokal

Pengambilan keputusan harus berbasis data terkini tentang kondisi ekosistem mangrove, dampak aktivitas wisata, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat membangun sistem pemantauan lingkungan untuk memantau kualitas ekosistem secara real-time dan mengambil langkah-langkah adaptif ketika terjadi penurunan kualitas.

8. Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Pendapatan dari kawasan wisata mangrove harus dikelola secara transparan dan digunakan untuk mendukung pemeliharaan serta rehabilitasi kawasan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana ini untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pemerintah Kota Medan dapat menciptakan pengelolaan wisata hutan mangrove di Sicanang yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Strategi ini juga dapat menjadi model pengelolaan ekowisata yang dapat diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan mangrove harus sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan mangrove di kota Medan yang sesuai dengan tujuan penataan daerah. Selain itu, ekowisata mangrove tersebut dibuat untuk edukasi dan pendidikan, juga sumber ekonomi bagi masyarakat. Ekowisata ini dikelola dan diawasi oleh kelompok masyarakat setempat yaitu, Kelompok pengelola daerah perlindungan mangrove sebagai organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan surat Keputusan Kepala Kelurahan Belawan Sicanang. Pemulihan kawasan mangrove di Belawan Sicanang membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan adalah melalui program rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan menanam kembali mangrove di area yang telah terdegradasi, menggunakan spesies asli yang sesuai dengan kondisi ekosistem setempat. Namun, upaya ini perlu diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat agar mereka memahami pentingnya menjaga keberlanjutan mangrove. Ketidakberlanjutan pengelolaan kawasan ekowisata ini menunjukkan perlunya perbaikan signifikan dalam hal pengelolaan yang lebih terintegrasi, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penerapan kebijakan yang lebih tegas dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan, kawasan ekowisata Mangrove Belawan Sicanang memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat lokal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, M. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ekowisata Di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(4), 259–269.
- Asriani, Sudarsono, & Wahyuddin. (2021). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Mangrove Dan Tambak Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus : Kab. Pati). *Jurnal Geodesi*, 10(1).
- Dian, R., Purba, B. M., Y Rumapea, N. H., & Eresina Pinem, D. (2024). Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan Di Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan Di Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*, 32(3), 246–258. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.44377>
- Damanik. (2013). *Pariwisata Indonesia: antara peluang dantantangan*. Yogyakarta.: Pustaka Palajar.
- Editya, N. (2020). DAMPAK KEBERADAAN EKOWISATA MANGROVE Sicanang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. Skripsi.
- Harefa, M. S. (2023, Januari 8). Jatuh Bangun Merawat Hutan Mangrove Sicanang. Retrieved from Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2023/01/08/jatuh-bangun-merawat-hutan-mangrove-sicanang/>
- Kaharuddin. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Ekowisata . *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 42-54.
- Kariaman. (2024). Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Yang Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 18(1), 2716–3083.
- Kartika, D., Utomo, S., & Pulungan, A. R. (2023). Ekowisata Mangrove dalam Pariwisata Berkelanjutan di Sumatera Utara. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 4, 46–60. <https://doi.org/10.34013/mp.v4i2.1393>
- Wahyuni Harahap, S., Haryanti, N., Nand Putra Lubis, R., & Ramadani Silalahi, P. (2023). Peran Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Menopang Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Vol. 2, Issue 3).